Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Oleh Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Fadlul Rahman Herza¹ Eko Handrian²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau
Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia
raulherza2000@gmail.com ekohandrian@soc.uir.ac.id

Received : February 27, 2024;

Accepted : 25 Juli 2024

Abstract

Stunting is an urgent problem that needs to be resolved as it will affect the quality of Indonesian human resources in the future. Human resources are a key factor in a country's success. This research was carried out to provide in-depth study on the implementation of the program of prevention and reduction of stunting in Puskesmas Limapuluh district Limapuluh city of Pekanbaru. The main objective of this discussion is how to prevent stunting in pregnant mothers and reduce the number of stunting cases. This type of study uses descriptive and quantitative methods, with the majority of respondents being female at 75 per cent, and the number of babies/children exposed to stunting at 47 per cent. The results of this study show that despite many government policies that have been taken to encourage the occurrence of stunting, the actual decline is still a long way from the target. In the district of Limapuluh City of Pekanbaru there are still a lot of people who do not have enough knowledge about stunting itself, its effects, causes, prevention and treatment. Therefore, widespread support is still needed to provide more detailed information on how to prevent stunting in early childhood.

Keywords: *Implementation, Program, Stunting, Prevention and Reduction*

Abstrak

Stunting merupakan permasalahan mendesak yang perlu diselesaikan karena akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Sumber daya manusia merupakan faktor utama keberhasilan suatu negara. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kajian mendalam mengenai implementasi program pencegahan dan pengurangan stunting di Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Tujuan utama diskusi ini adalah bagaimana mencegah stunting pada ibu hamil dan menurunkan angka kasus stunting. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 75%, dan jumlah bayi/balita yang terkena stunting sebanyak 47 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kebijakan pemerintah yang telah dilakukan untuk mendorong terjadinya stunting, namun angka penurunan sebenarnya masih jauh dari target. Di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang stunting itu sendiri, dampaknya, faktor penyebab, pencegahan dan cara pengobatannya. Oleh karena itu, masih diperlukan dukungan luas untuk memberikan informasi lebih detail mengenai cara mencegah stunting pada anak usia dini.

Kata Kunci: *Implementasi, Program, Stunting, Pencegahan dan Penurunan*

Pendahuluan

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Stunting diakibatkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yg berkali-kali. Kondisi lingkungan, baik itu polusi udara, air bersih bisa juga mempengaruhi stunting. Tidak jarang pula masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan.

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan *stunting* sebagai upaya agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Gejala yang ditimbulkan akibat stunting antara lain anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang tertunda.

Pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki pola gizi di masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap kejadian stunting terutama sejak awal pembentukan janin sampai kelahiran bayi dan sampai bayi berusia dua tahun. Dua tahun kehidupan adalah periode emas bagi kehidupan anak. Pada fase ini kecukupan gizi sangat perlu diperhatikan untuk pertumbuhan bayi sehingga dapat mencegah dan jumlah penurunan pada Stunting. Program Pencegahan dan Penurunan Stunting adalah salah satu metode penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Dikarenakan tingkat jumlah kasus Stunting dapat meningkat per-tahun yang dimana memerlukan penanganan, pencegahan dalam penurunan Stunting disetiap kecamatan, kabupaten dan kota. Puskesmas secara otomatis melaksanakan program kerja tersebut yang dimulai dengan pendataan wilayah kerja, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ataupun program yang mengarah pada penanganan gizi. Semua tahapan kehidupan dimulai dari bayi hingga usia lanjut. Selain itu juga menjalankan kegiatan di Posyandu Keluarga yang salah satu tujuannya adalah untuk menangani masalah gizi di wilayah kerja Puskesmas.

Untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan maka pelaksanaan yang dilakukan akan mendukung semua capaian program, oleh karena itu diperlukan dukungan kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk mencapai pelaksanaan tersebut yaitu " Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan

pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif di dukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Dalam melaksanakan kegiatan terkait gizi, selaku kepala bidang Gizi Puskesmas Limapuluh mengatakan kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan bagian gizi sebanyak 4 orang, sehubungan dengan adanya 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Limapuluh, maka dibutuhkan masing-masing 1 orang pegawai untuk menjadi penanggung jawab permasalahan gizi dimasing-masing kelurahan, namun untuk bidang kesehatan bagian gizi itu sendiri hanya ada 1 orang pegawai saja, dapat dilihat dari permasalahan dalam penanganan melakukan penyuluhan untuk pencegahan salah satunya dalam program kasus stunting di Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Jumlah balita yang terkena stunting di Kecamatan Limapuluh pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 namun masih menjadi angka yang paling tinggi dari 15 Kecamatan yang terdata, dapat dilihat dari data yang diperoleh berdasarkan E-PPGM oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan masih menjadi lokus utama angka paling tinggi pada tahun 2022.

Tinjauan Pustaka

Menurut Van Meter Van Horn dalam Julianda dan Eko Handrian 2022: 8 mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-masing variabel merupakan faktor signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita - cita/tujuan yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Pelaksanaan adalah pergerakan yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. (Nawawi, 2008)

Pelaksanaan menurut (Wesra, 2011) adalah sebagai usaha- usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Pelaksanaan adalah bahwa sumber daya pelaksanaan yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan

dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. (Adisasmita, 2011).

Impelementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. (Solihin, 2004) mengatakan Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian impelementasi kebijakan yakni timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Model implementasi yang berperspektif top down dikemukakan oleh George C. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect impact on implemmentation. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu (Agustino, 2008)

1. Komunikasi, komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public, impelementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik.
2. Sumber daya, mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, dalam mengimpelemntasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Diposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.
4. Struktur Birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan I mplementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Dalam pendekatan yang menggunakan teori dari Van Metter dan Carl Van Horn Implementasi kebijakan publik mengatakan proses implementasi kebijakan sebuah abstraksi atau performansi suatu Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja Implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia pelaksana dan kinerja kebijakan public yang dimana terdapat enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi atau pelaksanaan, yaitu (1) Standar Dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik

Agen Pelaksana, (4) Sikap/Kecendrungan, (5) Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana, (6) Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial.

Yang dimana indikator Variabel Pelaksanaan yang sangat menentukan keberhasilan Pelaksanaan, yaitu :

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang, merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implemementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sumber daya sumber daya lain yang perlu diperhitungkan jugas, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan oganisasi informal yang akanterlibat pengimpelementasikan kebijakan publik, merupakan sangat penting karena kinerja implemementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tetap serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana sangat mejadi pengaruh keberhasilan atau tindak kinerja implementasi kebijakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implemementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan, Ekonomi,Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna meninal kinerja implementasi public dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Carl Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan Ekonomi,Sosial, dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya mengimpelementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan

oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Metode

Tipe penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi, berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan melalui pengumpulan data dan menganalisa, sehingga dapat mengevaluasi dan mendapatkan hasil dalam permasalahan penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif bertujuan untuk menghubungkan antar variabel dalam sebuah populasi dikarenakan hal tersebut, peneliti berkeinginan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan fakta dilapangan yang dapat diukur dan dari data diperoleh peneliti dapat melakukan analisis terhadap hipotesis dari penelitian ini sehingga hasil dari penelitian ini akan teruji secara ilmiah dan empiric, dengan hasil akhir yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 2: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh mengenai Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Oleh Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

No	Indikator	RESPONDEN			
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Standar & sasaran kebijakan	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
2	Sumber daya	2 (75%)	1 (25%)	0 (0%)	3 (100%)
3	Karakteristik agen pelaksana	2 (75%)	1 (25%)	0 (0%)	3 (100%)
4	Sikap/kecendrungan	0 0%	3 60%	0 (0%)	3 (100%)
5	Komunikasi antar organisasi	1 33,3%	1 33,3%	1 (33,3%)	3 (100%)
6	Lingkungan sosial dan ekonomi	1 20%	2 60%	0 (0%)	4 (100%)
Jumlah		12	11	1	24
Rata-rata		2	1	1	4
Persentase		50%	25%	25%	100%

Tabel 3 : Rekapitulasi Tanggapan Ibu Hamil

No	Indikator	RESPONDEN			
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Standar & Sasaran Kebijakan	15 (75%)	5 (25%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Sumber Daya	12 (60%)	7 (35%)	1 (5%)	20 (100%)
3	Karakteristik Agen Pelaksana	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Sikap/Kecendrungan	13 (65%)	7 (35%)	0 (0%)	20 (100%)
5	Komunikasi Antar Organisasi	13 (65%)	7 (35%)	0 (0%)	20 (100%)
6	Lingkungan Sosial Dan Ekonomi	13 (65%)	7 (35%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		78	41	1	120
Rata-rata		13	6,8	0,2	20
Persentase		65%	34%	1%	100%

Tabel 4 : Rekapitulasi Tanggapan RespondenWali stunting

No	Indikator	RESPONDEN			
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Standar & sasaran kebijakan	5 (25%)	15 (80%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Sumber daya	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Karakteristik agen pelaksana	7,5 (37,5%)	5,5 (27,5%)	7 (35%)	20 (100%)
4	Sikap/kecendrungan	5,5 (27,5%)	14,5 (72,5%)	0 (0%)	20 (100%)
5	Komunikasi antar organisasi	5 (25%)	7 (35%)	8 (40%)	20 (100%)
6	Lingkungan sosial dan ekonomi	15,5 (77,5%)	4,5 (22,5%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		50,5	54,5	15	120
Rata-rata		8,4	9,1	2,5	20
Persentase		42%	45,5%	12,5%	100%

Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan bahwa rata-rata jawaban responden Wali dari Stunting berada pada kategori "Terlaksana". Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, dilihat dari hasil penyebaran kuesioner pada wali stunting, mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan masyarakat peduli untuk mencegahnya stunting pada balita oleh kepala Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dalam memberikan penanganan stunting.

Indikator Sumber Daya, dilihat dari hasil penyebaran kuesioner pada Wali Stunting mereka menjawab terlaksana. Tetapi pada penilaian mereka, pegawai Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, memerlukan tenaga kerja bantuan lebih, untuk menjalankan kegiatan pencegahan pada stunting, agar lebih mudah memberikan penanganan kepada masyarakat di posyandu atau dalam kunjungan rumah kerumah.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, dilihat dari penyebaran kuesioner pada Wali Stunting, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan mereka mengikuti intruksi pegawai puskesmas dalam Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting.

Indikator Sikap/Kecendrungan Pelaksana, dilihat dari penyebaran kuesioner pada Wali Stunting, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan dalam melakukan program pegawai memberikan penanganan dengan baik kepada anak atau balita. Walaupun selama kegiatan berjalan belum semaksimal yang seharusnya.

Indikator Komunikasi Antar Organisasi, dilihat dari penyebaran kuesioner pada Wali Stunting, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan dalam pemahaman pesan kami diberikan pemahaman dengan baik terkait bagaimana pencegahan stunting dan penurunan stunting.

Indikator Lingkungan Ekonomi Dan Sosial, dilihat dari penyebaran kuesioner pada Wali Stunting, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan dalam kondisi sosial, masyarakat membaaur dengan baik kepada pegawai-pegawai puskesmas yang melaksanakan program pencegahan stunting dan penurunan stunting maupun staff umum di Puskesmas Limapuluh.

Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan dan penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi Wali dari Stunting bahwa Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Oleh Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru "Terlaksana". Hal ini dikarenakan masih memerlukan bantuan tenaga kerja, kesiapan mengerjakan tugas dan kecekatan petugas dalam menjalankan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Oleh Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tersebut program pencegahan stunting ini masih dapat dikategorikan "cukup terlaksana " karena belum semua indikatornya terlaksana dengan baik maka dari itu dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Indikator Standar dan sasaran kebijakan berada pada kategori Terlaksana, hal ini dikarenakan Sesuai dengan sasaran kebijakan, Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting.
1. Indikator Sumber Daya berada pada kategori Kurang Terlaksana. hal ini dikarenakan pihak pegawai Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pencatatan, pelaporan dan tanggung jawab mereka masih memerlukan tenaga kerja dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.
2. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori cukup terlaksana. hal ini dikarenakan Di Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, jumlah kasus stunting terus meningkat karena tugas dan pokok yang dilaksanakan belum efektif.
3. Indikator Sikap Para Pelaksana pada kategori Cukup terlaksana yang dimana pada kecekatan petugas atau staff masih belum bejalan dengan baik, dikarenakan kurangnya tenaga kerja untuk saling bekerja sama dalam menjalankan program pencengahan dan penurunan stunting.
4. Indikator Komunikasi Antar Organisasi pada kategori Terlaksana, yaitu pemahaman terhadap pesan yang disampaikan kepada masyarakat berjalan dengan baik .
5. Indikator Lingkungan Ekonomi Dan Sosial, pada kategori Cukup Terlaksana yang dimana kondisi ekonomi masyarakat masih dikatakan belum stabil, namun kondisi sosial cukup terbilang baik pada saat melakukan kegiatan program pencengahan dan penurunan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, M. (2014). *Manejemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Adisasmata, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* . Bandung: Alfabeta.
- Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dahlan, A. (2014). *Populasi dan Sampel*.
- Donal Van Meter & Carl Van Horn, (1975), *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta
- Donni, Junni Priansa (2014). *Perencanaan & Pengembangan SDM*, Bandung: Alfabeta

- Devi, M, w. (2018). *Manajemen CSR*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Edward III. C George, (1980). *Impelementing Public Policy* .Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. (2009) *Perencanaan, Implementasi, & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Pustaka Cakra: Surakarta.
- Gibson, James L. et al. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Gie, T. L. (2012). *Adminstrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Public: Proses, Analisis dan Partisipasi* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handoko, H. T. (2012). *Manejemen*. Jakarta: BPFE.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Hasibun, M. (2014). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indradi, S. S. (2016). *Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang,Jatim: Intrans Publishing.
- Indrawijaya, A. (2009). *Prilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Kalimetro.
- Irra, D. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. DEPOK: PT. RajaGrafindo Persada.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-dasar Adminitrsasi Publik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Manullang, (2009). *Dasar-dasar Managemen*, Cetakan Keduapuluh Satu. Yogyakarta, Penerbit : Gajah Mada University Press.

- Mazmanian & Sebastiar, (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pasolog, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sadaryamanti. (2014). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, Sondang. P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P. (2011). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P. (2011) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siswanto, H. B. (2013). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, A. W. (2004). *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi Ke Impelementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Affan. (1998). *Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP*.
- Syafri, W. (2012). *Studi Administrasi Publik*. Janitagor: Erlangga.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga.
- Syamsir Syamsudin. I. (2016). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya,. & Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. . Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

- Terry, G. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Terry, G. R. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen* . Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul, Solichin, (2008), *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- Wanardi. (2009). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wesra. (2011). Pengertian Pelaksanaan. In R. Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (p. 24). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulkifli, & Yogya, M. A. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Marpoyan Tujuh : Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli, & Yogya, M. A. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen 2014*. Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh.

Jurnal :

Handrian, E., & Suriani, L. (2022). PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OLEH SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KENDARAAN MOBIL BARANG). *JURNAL KEMUNTING*, 3(2), 774-793.

Undang-Undang Serta Peraturan Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG).
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru.
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting